Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis
Vol. 2 No. 2, 2025
https://jossama.com

SINERGI PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN

Ulfa Nur Halimah[1], Erlin Kurniati[2]

[1,2] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana partisipasi masyarakat dan peran pemerintah bekerja sama dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan peran masyarakat serta pemerintah. Pendekatan penelitian ini, yang bersifat deskriptif dan berfokus pada tinjauan pustaka, ditulis dengan mengkaji teori-teori yang relevan dan membandingkan serta mengontraskan faktor-faktor terkini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih di bawah standar dan peran pemerintah masih tampak elitis, karena pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan sementara masyarakat berkontribusi dengan memberi tahu pemerintah apa yang dibutuhkan masyarakat.

Keywords: *Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan*

CORRESPONDING:
Name :
Ulfa Nur Halimah
E-mail:
ulfanurhalimah2102@gmail.com

ARTICLE HISTORY:
Published Online:
11-04-2025

E-ISSN:
3046-7225

PUBLISHER:
Noble Cendekia Indonesia

1. PENDAHULUAN

Penggunaan sumber daya yang ada saat ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya—dalam hal pendapatan, prospek pekerjaan, sektor ekonomi, akses terhadap pembuatan kebijakan, dll.—dikenal sebagai pembangunan daerah. Di sisi lain, perencanaan pembangunan daerah adalah proses pengorganisasian beberapa fase kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menggunakan dan mendistribusikan sumber daya yang tersedia dengan cara yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan regional atau area dalam jangka waktu tertentu. Pemanfaatan sumber daya energi saat ini tidak akan berjalan dengan baik jika inisiatif pembangunan daerah tidak dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah.

Meskipun kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan, namun salah satu upaya serius yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh adalah dengan menemukan paradigma pembangunan yang tepat. Paradigma pembangunan telah berubah dari waktu ke waktu, dengan fokus pada paradigma pembangunan berbasis masyarakat (juga dikenal sebagai pembangunan yang berorientasi pada rakyat), yang menyerukan kolaborasi dan keseimbangan peran yang baik antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh pembagian tanggung jawab dan kedudukan. Bahkan dengan adanya desentralisasi, di mana pemerintah memberikan kewenangan dan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan potensinya sendiri, banyak daerah yang belum mengalami peningkatan pembangunan ekonomi sejak otonomi daerah dilaksanakan. Padahal, jika melihat potensi daerah, perekonomiannya dapat tumbuh.

Faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan suatu daerah adalah kesatuan masyarakat, sumber daya alam, organisasi, dan pemerintah. Karena proses pembangunan hanya dapat dilaksanakan oleh dan dari masyarakat, maka masyarakat sangat penting bagi pembangunan. Selain itu keberhasilan program pembangunan banyak ditentukan juga oleh sifat kemampuan dan keterampilan para pemimpin atau pemerintah dalam menggerakan kegiatan pembangunan, pemimpin yang dapat membimbing dan membawa aspirasi masyarakat dalam pembangunan

wilayahnya secara tidak langsung akan dapat merangsang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, atau dengan kata lain, keinginan masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan (Alfian, 2019). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pedesaan, ketika masyarakat desa mempromosikan perdamaian sosial dalam situasi ini dengan berfokus pada kerja sama atau sinergi, termasuk bekerja dengan para pemimpin desa untuk mendorong pertumbuhan.

Mirip dengan Kabupaten Lampung Tengah, masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah ketidakmampuan pemerintah desa atau kepala desa untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Masih kurangnya keterampilan pemecahan masalah dalam proses perencanaan pembangunan, kurangnya masukan masyarakat untuk memperbaiki jalan yang rusak, dan kurangnya insentif bagi warga masyarakat untuk menyumbangkan ide atau tenaga dalam proses pembangunan. Selain itu, kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta kurangnya fasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Pada penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan bagaimana sinergi peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah: 1) Mengetahui pemerintah dan konsep pembangunan berkelanjutan, 2) Mengetahui pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan 3) peranan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan, 4) peranan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep pembangunan

Pembangunan juga di definisikan sebagai suatu tahapan perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang diartikan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk seluruh rakyat melalui kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan mereka.

Agar dapat maju ke arah keadaan yang lebih baik, baik secara material maupun spiritual, pembangunan pada hakikatnya harus merupakan suatu transformasi menyeluruh dari suatu masyarakat atau suatu modifikasi dari sistem sosial secara keseluruhan, dengan mengabaikan berbagai kebutuhan dan keinginan mendasar dari individu dan kelompok sosial di dalamnya (Todaro, 2000).

Suryono (2004) menuliskan ada 4 paradigma pembangunan, yaitu:

a. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)

   Salah satu aliran pemikiran yang mendukung peningkatan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan dikenal sebagai "paradigma pertumbuhan." Memperbaiki kondisi negara dan masyarakat merupakan tujuan utama paradigma pertumbuhan.

b. Paradigma pembangunan pertumbuhan dan pemerataan (*Growth and equity strategy development*)

   Pendekatan ini lebih difokuskan pada pembangunan sosial dan pengelolaan sumber daya manusia serta investasi dalam proses pembangunan. Namun, penerapan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ini justru meningkatkan ketergantungan pada negara lain

c. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

   Pembangunan harus difokuskan pada tantangan terkait sumber daya terbarukan dan tak terbarukan, sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang memberikan gagasan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, rencana pemeliharaan dan pemulihan akan dilaksanakan seiring dengan pemanfaatan semua potensi dan kajian pembangunan.

d. Paradigma *Human Development*

   Salah satu metode pembangunan yang mempertimbangkan lingkungan dan pembangunan yang berwawasan manusia adalah Paradigma Pembangunan Manusia. Pembangunan tidak berpihak pada kelas penguasa, tetapi pada rakyat.

2.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu usaha yang disengaja dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam suatu strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi mendatang, sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, saling terkait dan memperkuat. Cara mewujudkannya diantara lain Mendorong inovasi di instansi pemerintah,Mengelola sumber daya alam secara efektif, Melindungi lingkungan, Mengurangi angka kematian akibat polusi air dan tanah, Memfasilitasi akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang rentan dan termarjinalisasi.

2.3 Pemerintah

Menurut Tjokroamidjojo (1995:18), Awaloedin membagi fungsi pemerintahan ke dalam tiga kategori:

a. Fungsi pengaturan, yang meliputi penetapan kebijakan, pemberian arahan dan instruksi, pengaturan melalui perizinan, dan pengawasan.
b. Pemilik usaha sosial atau komersial yang dapat dijalankan secara pribadi atau mandiri.
c. Pelaksanaan berbagai usaha sosial atau ekonomi secara mandiri. Menurut Adisasmita (2006:11), fungsi pemerintah desa dalam pembangunan lebih terbatas pada fungsi sebagai penyalur tujuan masyarakat, pemandu partisipasi masyarakat, dan pelaporan pesan-pesan pembangunan.

Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut haruslah saling terkait dalam konteks pembangunan. Hal ini berarti bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai dengan keadaannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa peran pemerintah dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Tugas pemerintah dalam pembangunan adalah menjaga ketertiban dan keamanan.

2. Muncul konsep negara pelayan, di mana pemerintah berperan sebagai pelayan sosial terhadap tuntutan yang harus dikendalikan oleh masyarakat.
3. Peran pemerintah sebagai wirausahawan atau penggerak inisiatif bisnis dari masyarakat. Sebagai pembaharuan atau pembangunan, pemerintah berperan sebagai unsur atau agen pembangunan.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Menurut Poerbakawatja (1981), partisipasi merupakan tanda demokrasi yang mana masyarakat ikut ambil bagian dalam pengembangan dan pelaksanaan semua inisiatif yang sesuai dengan berbagai kepentingan. Bergantung pada kedewasaan dan tingkat akuntabilitas mereka, masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Partisipasi terjadi di bidang pertumbuhan maupun bidang material dan fisik. Karena masyarakat adalah pihak yang mengetahui masalah mereka dan cara terbaik untuk menyelesaikannya, pembangunan yang tidak melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya sering dianggap gagal memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Sukardi (2009), realisasi hak-hak warga negara bergantung pada partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka. pendapat Arnstein, peran masyarakat merupakan bagaimana masyarakat dapat ikut serts dalam perubahan sosial yang mendukung mereka mendapatkan keuntungan dari kelompok yang berpengaruh.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan (Hardjosoemantri, 1986). "Kemitraan Pemerintah dan Swasta" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis keterlibatan masyarakat ini, yaitu kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Untuk mewujudkan konsep ini, langkah paling mendasar adalah menyalurkan penggerak masyarakat pada tahap pengembangan pengambilan keputusan.

3. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini fokus pada kajian Pustaka. Penulisannya di lakukan degan mengkaji teori-teori yang relevan serta menganalisis antar variable variable yang ada. Pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber tertulis yang ada diharapkan akan memberikan die dan sudut pandang yang kontekstual untuk melihat bagaimana sinergi peran pemerintah dan masyarakat dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah dan gagasan pembangunan berkelanjutan, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, peran pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan, dan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan semuanya akan dikaji lebih mendalam dalam studi ini. Buku, jurnal, dan informasi terkait lainnya yang dapat diperoleh secara luring atau daring melalui sumber daya seperti Google Scholar dan media lainnya merupakan contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam studi ini.

4. HASIL DAN KESIMPULAN

Pemerintah dan Konsep Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan

Di era globalisasi ini, pemerintah seharusnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi regional, dalam Pembangunan fisik seperti di Daerah Lampung Tengah sekarang lebih diperhatikan pada progam pembangunan dan perbaikan jalan dan penataan lingkungan berkelanjutan, guna menciptakan tata guna ramah lingkungan Adapun perhatian anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah khususnya untuk infrastruktur, agar dapat mempermudah aktivitas penunjang kegiatan pembangunan yang di selenggarakan di Kabupaten Lampung Tengah. Prioritas pusat ekonomi di tengah lebih besar, terutama wilayah tengah yang biasanya dilewati oleh pusat ekonomi. Sebab, jika dananya bukan dari pusat, maka pembangunan infrastruktur dari daerah akan difokuskan karena menggunakan APBD. Itupun jumlahnya tidak sedikit, karena yang mengusulkan kepada pemerintah daerah dalam setiap anggaran pembangunan pasti ada perbedaan penganggaran di setiap daerah, yang mungkin saja karena kondisi jalan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional merupakan pertimbangan penting bagi perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional harus berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan; namun, ada Dengan mempertimbangkan tantangan dan masalah strategis daerah, tujuan pembangunan daerah adalah perancangan atau pelaksanaan pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir dari rencana pembangunan dalam jangka waktu tertentu.

Masyarakat yang lebih sejahtera, maju, dan mandiri hanya dapat dicapai melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sebagai proses yang berkelanjutan, pembangunan harus mampu memajukan peradaban, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan memiliki tujuan sosial dan ekologis di samping tujuan ekonomi (Fristikawati, Alvander, & Wibowo, 2022). Gagasan pembangunan daerah yang berkelanjutan sangat penting, terutama jika menyangkut bagaimana pemerintah daerah di daerah pedesaan mengelola sumber daya alam, khususnya tanah dan air, dan mempromosikan ketahanan pangan di daerah miskin.

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah berkelanjutan

Peran Pemerintah dalam Pembangunan, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah sedang memfokuskan seperti penaganan rekonstruksi jalan, agar mempermudah pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat.

Pembangunan sangat dibantu oleh pemerintah dan semua perangkatnya. Munir menyatakan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut, berdasarkan fungsinya:

1. **Entepreneur**

   Sebagai pengusaha, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis di wilayah hukumnya. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam situasi ini. Untuk menguntungkan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik dan lebih murah. Melalui langkah-langkah sederhana untuk usaha kecil, yaitu dengan menawarkan

dukungan dan pelatihan kepada perusahaan perorangan untuk meningkatkan operasinya, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan pengusaha. Jika perusahaan daerah kekurangan dana, pemerintah dapat membantu dengan menawarkan kredit dan subsidi.

2. Koordinator

Agar suatu daerah dapat maju, maka pemerintah daerah harus mampu mengkoordinasikan pembangunan ekonomi di daerahnya, khususnya dengan merumuskan kebijakan atau menyusun rencana pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Dalam kapasitas ini, pemerintah daerah dapat melibatkan kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan analisis data tentang keadaan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur terpenting dalam pembangunan daerah, melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat dan perangkat daerah untuk mengetahui keadaan dan kondisi daerah yang sebenarnya. Untuk mengumpulkan informasi dan menyusun rencana pembangunan daerah ke depan, pemerintah daerah melakukan survei dan berinteraksi dengan masyarakat. Atau melalui pemotretan/profil daerah, fisik wilayah geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya, lingkungan hidup, potensi wilayah, dan pemerintah daerah juga harus memperhatikan kepada peluang dan tantangannya daerah tersebut.

3. Fasilitator

Peningkatan lingkungan sikap (budaya atau perilaku masyarakat) di wilayah hukumnya dapat membantu pemerintah daerah memainkan peran fasilitator dengan mempercepat pembangunan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan regulasi perencanaan tata ruang daerah (zonasi) dan mempercepat proses perencanaan dan pembangunan.

Selain menyediakan atau memperbaiki lingkungan, peran pemerintah daerah sebagai fasilitator meliputi membantu dunia usaha dalam memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dan mencegah terjadinya degradasi lingkungan alam di sekitarnya. Jika tidak, investor akan memanfaatkan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatkan lingkungan mental, khususnya dalam kaitannya

dengan perbaikan proses dan layanan perizinan, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dan mempercepat pembangunan.

4. **Stimulator**

   Dengan mengambil langkah-langkah khusus yang dapat mendorong dunia usaha untuk masuk ke kawasan tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di kawasan tersebut, pemerintah daerah dapat berperan sebagai katalisator bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan-perusahaan baru.

   Stimulan ini antara lain dapat diwujudkan dengan membuat brosur-brosur untuk pengembangan kawasan industri, mendirikan gerai-gerai koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membantu UMKM dan koperasi dalam pameran-pameran mereka, dan lain sebagainya.

   Pola pikir pemerintah mencakup kepedulian masyarakat bisnis terhadap usaha kecil karena usaha kecil berupaya meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengikuti kebijakan pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Terdapat Konsep *collaborative governance* dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti daerah Di Lampung Tengah pelaksanaan pembangunan yang di usulkan melibatkan peran masyarakat dan perangkat desa khususnya dalam proses pemantauan untuk di evaluasi seperti infrastruktur jalanan. Pemerintah didorong untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, swasta, masyarakat, maupun komunitas masyarakat madani, guna menjalin kerja sama yang kolaboratif dalam mencapai sasaran program atau kebijakan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, sumber daya, dan jaringan menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan daerah dengan berbagai cara, antara lain:

1. **Perencanaan**

   Aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan musyawarah selama musrenbang atau tahap desain awal merupakan beberapa cara agar pengembangan masyarakat dapat diikutsertakan.

Program pembangunan yang telah dirancang secara kolaboratif merupakan manfaat dari perencanaan, tetapi potensi konflik yang tak terelakkan antar kelompok sosial dapat menghambat atau bahkan menunda pelaksanaan keputusan kolektif.

Perlu dicatat bahwa hanya masyarakat kecil yang dapat secara efektif mengadopsi partisipasi langsung dalam perencanaan; di masyarakat besar, hal ini lebih menantang, meskipun masih memungkinkan untuk melakukannya melalui sistem perwakilan. Apakah para perwakilan benar-benar mewakili masyarakat adalah masalah yang harus diselidiki.

2. Penganggaran

penyampaian aspirasi juga dilakukan dengan konsultasi publik diskusi, dan musyawarah untuk mengawasi kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS).

dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa:

- Pembangunan lebih relevan: Pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- Pembangunan lebih transparan: Proses penganggaran lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- Pembangunan lebih akuntabel: Masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif.
- Pembangunan lebih berkelanjutan: Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud karena masyarakat ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan.

3. Pelaksanaan

Dengan memberikan subsidi kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa, ikut serta dalam kerja lapangan, memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil, dan mengawasi proyek pembangunan yang dilaksanakan, masyarakat dapat menjadi mitra. Perencanaan pembangunan

masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar telah dipertimbangkan.

4. **Pengawasan dan evaluasi**

   Masyarakat dapat memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan mutu pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi serta mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2017). Seperti menghadiri rapat penyusunan peraturan daerah, bergabung dalam tim atau kelompok kerja penyusunan peraturan daerah, melakukan uji sahih dengan pihak tertentu untuk memperoleh tanggapan, melakukan konsultasi publik, menyampaikan aspirasi, menghadiri kunjungan kerja, menghadiri sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

5. **Pembentukan Peraturan Daerah**

   Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Daerah (Pemda) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda). Melalui peran serta masyarakat, aspirasi masyarakat dapat ditampung dan tidak hanya melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan Perda. Masyarakat juga dapat diminta untuk memberikan sumbangan pemikiran guna menghasilkan Perda yang bermutu, yang pada akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Faktor penghambat peranan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu

a) Kurangnya Alokasi Sumber Daya Alam yang memadai

Salah satu aspek terpenting dari perencanaan pembangunan daerah adalah distribusi sumber daya yang tersedia. Namun, sering kali, pendanaan dan tenaga kerja tidak mencukupi untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Keadaan ini dapat membatasi kemungkinan pertumbuhan daerah dan mempersulit pelaksanaan proyek pembangunan. Masyarakat, yang membutuhkan peningkatan aksesibilitas, dapat terkena dampak jika, misalnya,

proyek pembangunan jalan raya di Lampung Tengah tertunda atau tidak selesai sesuai jadwal karena alokasi dana yang tidak memadai.

b) Kurangnya Efektifitas Koordinasi Antara Pemerintah Dan Swasta

Ketika merencanakan pertumbuhan regional, kolaborasi efektif antara sektor publik dan komersial sangatlah penting. Akan tetapi, koordinasi kedua belah pihak seringkali tidak efektif. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan regional dan menyebabkan inisiatif pembangunan dilaksanakan lebih lambat.

Sebagai contoh, dalam proyek pengembangan industri di suatu kawasan, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menjadikan keterlambatan dalam perizinan, konflik kepentingan, dan ketidakjelasan tanggung jawab antara pihak-pihak terkait.

c) Tidak Tepatnya Perencanaan

Perencanaan yang tidak akurat berpotensi menjadi masalah utama bagi pertumbuhan regional. Banyak alasan yang menyebabkan ketidakakuratan ini, termasuk tidak adanya data dan informasi yang dapat diandalkan, kurangnya pengalaman dan keahlian para perencana, dan dampak kepentingan ekonomi dan politik pada proses perencanaan. Misalnya, rencana pembangunan yang gagal memperhitungkan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat mungkin tidak efektif dan gagal memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

d) Rendahnya Mentalitas Sumber Daya Aparatur

Salah satu penyakit birokrasi yang kerap kali merambah ke seluruh jenjang sistem pemerintahan kita adalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan wewenang baik dalam pemerintahan maupun pembangunan. Rendahnya mentalitas sumber daya aparatur pemerintah yang seharusnya mereka miliki masih menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah.

e) Situasi Birokrasi Pemerintahan Kaya Struktur Miskin Fungsi

Sistem pemerintahan daerah terkesan kurang efisien karena bentuknya yang kaku. Banyaknya struktur yang ada tidak memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, malah membuat administrasi negara menjadi tidak konsisten, yang pada akhirnya menyebabkan pemborosan anggaran mengingat

pendapatan asli daerah (PAD) daerah sangat rendah dibandingkan dengan dana perimbangan pusat. Hal ini berdampak pada inisiatif pembangunan masing-masing daerah.

Faktor penghambat peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu;

1) Hambatan secara Internal

Secara teoritis, mempunyai hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, meliputi umur, jenjang pendidikan, pengetahuan, jenis pekerjaan, serta lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat.

a) Masih rendah terhadap pentingnya keterlibatan atau partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan Musrenbang masih menghadapi kendala internal saat ini, yaitu terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat masih beranggapan bahwa keikutsertaan mereka dalam kegiatan Musrenbang tidak berpengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, dan mereka juga beranggapan bahwa pembangunan yang sedang berjalan tidak akan bermasalah jika mereka tidak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang.

Menurut Julianty Pradono dan Ning Sulistyowati (2013:91), “Pendidikan tinggi membekali seseorang agar mampu berpikir lebih logis dan rasional, mampu melihat suatu persoalan dari berbagai sisi sehingga mampu menganalisis dan memecahkan suatu masalah dengan lebih baik.” Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih kurang peduli terhadap signifikansi keterlibatan atau partisipasinya dalam kegiatan Musrenbang.

b) faktor pekerjaan masyarakat

Tentunya pekerjaan masyarakat yang menghabiskan waktu ini berdampak kepada sedikitnya waktu untuk mengikuti kegiatan Musrenbang. Masyarakat lebih mementingkan kepentingannya untuk melakukan aktivitas pekerjaan yang mereka prioritaskan.

2) Faktor Eksternal

Pemerintah daerah yang terlalu menguasai dalam rencana pembangunan di tiap daerah inilah , oleh sebab itu pembangunan yang dijalanka di suatu desa/daerah seperti di daerah Kabupaten Lampung Tengah terkesan tidak partisipatif dan bersifat *top down*. Pembangunan yang bersifat top down pastinya banyak mengganggu masyarakat sebgai tujuan pembangunan yang dilaksanakan selaras kemauan pemerintah bukan kemauan masyarakat, selaras dengan pendapat Retno Susanti ddk (2019:41) bahwa "Berdasarkan empiris di lapangan, dalam pelaksanaannya pendekatan tersebut dianggap kurang berhasil. Karena tidak ada hubungan antara masyarakat dan pemerintah, sering kali ada unsur kepentingan dalam metode top-down. Tentu saja, suatu pembangunan kurang berhasil bagi masyarakat jika menghambat tuntutan masyarakat.

3) Faktor struktukral

a) Sikap Apatis masyarakat terhadap musrenbang

Karena masyarakat tidak mendapatkan laporan tentang solusi yang mereka usulkan, pemerintah, khususnya SPKD, terus menunjukkan sikap apatis yang besar, yang bersumber dari pengalaman musrenbang sebelumnya dan membuat mereka percaya bahwa musrenbang hanya sekadar formalitas.

b) Sistem administrasi yang terpusat atau sentralistis

Segala sesuatu dalam pemerintahan tunduk pada peraturan, yang pada akhirnya akan menghalangi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

c) Hambatan Yang Dipengaruhi Oleh Lingkungan Politik

Menurut Oakley, hambatan struktural yang dipengaruhi lingkungan politik paling banyak terjadi di negara-negara dengan sistem politik terpusat yang bergantung pada pengambilan keputusan, perencanaan, dan penetapan arah pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sebab capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional, Tujuan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan bukan hanya berorientasi pada sisi ekonomi saja, tetapi juga memiliki tujuan sosial serta . Tujuan ekonominya adalah eko-efisiensi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas serta pemerataan.

Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Menetapkan peran pemerintah dalam membangun bersama masyarakat merupakan unsur paling krusial yang harus menjadi landasan pembangunan; secara khusus, para wirausahawan bertanggung jawab untuk dapat menjalankan suatu bisnis di suatu wilayah. Koordinator, yakni dengan memutuskan kebijakan atau mengeluarkan rencana menyeluruh bagi pembangunan ekonomi untuk memajukan daerah tersebut. Fasilitator, yakni dengan mempercepat pembangunan melalui perilaku atau budaya masyarakat setempat. Mendorong pendirian dan pertumbuhan perusahaan dengan mengambil langkah-langkah unik yang dapat membujuk dunia usaha untuk datang ke daerah tersebut.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap langkah pembangunan daerah dengan berbagai cara, termasuk perencanaan (musyawarah pada tahap musrenbang dan desain dasar). Penganggaran (konsultasi publik, diskusi, dan musyawarah juga digunakan untuk menyampaikan aspirasi). Pelaksanaan: Hibah kepada pemerintah daerah merupakan salah satu cara masyarakat dapat menjadi mitra. Evaluasi dan pengawasan (masyarakat dapat menjamin bahwa kegiatan sesuai dari segi jenis, jumlah, dan kualitas, serta kapan dilaksanakan dan selesai).

Pemerintah telah mengidentifikasi beberapa hambatan terhadap pembangunan daerah berkelanjutan, seperti alokasi sumber daya alam yang tidak memadai, yang merupakan komponen penting dari perencanaan pembangunan daerah; faktor pekerjaan masyarakat, yang tentu saja mengakibatkan terbatasnya waktu untuk melaksanakan Agenda Musrenbang; dan hambatan yang ditemukan masyarakat terhadap pembangunan daerah berkelanjutan, termasuk salah satunya Hambatan

internal Secara teoritis, ada hubungan antara tingkat partisipasi dan ciri-ciri pribadi termasuk usia, pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan. masih meremehkan pentingnya keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat, yang merupakan hambatan yang muncul secara internal selama Musrenbang dan secara khusus terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat.

B. SARAN

1. Dalam rangka mewujudkan dan mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan yang semakin maju, diharapkan pemerintah Indonesia mampu berkolaborasi dengan masyarakat. Apa yang telah dicapai bersama oleh pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memajukan pembangunan daerah, perlu selalu diperhatikan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, terutama agar pemerintah dapat mewujudkan konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah berkelanjutan, sebagian besar masyarakat Indonesia masih perlu belajar tentang evolusi sinergi masyarakat dan pemerintah.
2. Dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam melaksanakan pengawasan secara otonom, diharapkan pemerintah dapat mengarahkan masyarakat sebagai mitra penggerak dalam pengawasan pembangunan. Sementara itu, untuk mendorong dan memajukan pembangunan lebih lanjut, diharapkan pemerintah dapat lebih proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat, mendorong mereka, dan mempertemukan semua pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Y.”Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat”. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *3* NO 1 (2019), 59-69.

Arief, A. F., & Hayati, R.” Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dilihat dari Aspek Struktur Birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong”. *Japb*, *4* no 2(2021), 732-749.

Conyers, Diana. 1994.Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Efendi, I. W., & Kurniati, E. Analisis Sektor Unggulan Kota Bandar Lampung (Sebuah Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB).

Febrian, R. A. ”Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, *2* no 2 (2016)., 187-200.

Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. “Pengaturan dan penerapan sustainable development pada pembangunan ibukota negara nusantara.” *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5. no 2 (2022): 739-749.

Herwan, M. D. K., & Saputra, Y. “Profil Masyarakat Petani Kopi Di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang”. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *1* no 4(2022), 499-508.

Imtihan, H., & Wahyunadi, F. “Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”. *Neo-Bis*, *11* no 1 (2017): 28-40.

Julistia, I., & Kurniati, E. “Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 4 no 3 . (2024), 222-230.

Karyadin, Azizah. " Peranan Masyarakat padaPembentukan Peraturan Daerah (Perda)". *Jurnal ilmu Hukum* 9, no. 1(2023): 97-105.

Kurniati, Erlin, Okta Supriyaningsih, Dilla Tyas Andini, Elza Dwi Lestari, and Salsabila Putri Prameswari. “*THE ROLE OF GOVERNMENT IN REGIONAL ECONOMIC*,” no. November (2024): 6064–6076.

Newman, R. “*Let's talk talk: Utilising metatalk for the development of productive collaborative dialogues*”. *Thinking Skills and Creativity*, 2 .no 12 (2017) : 1-12. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.04.006

Oakley, Peter,et al.1991.Projec with People, The Practice of Participation in Rulal Developmen, International Labour Office, Ganeva.

Pereira, L., Supriyono, B., & Makmur, M. “Perencanaan Pembangunan Permukiman Sebagai Upaya Peningkatan Kelayakan Hidup Masyarakat”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, *4* no 2 . (2015): 22-35.

Pradono, J., & Sulistyowati, N,. “Hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan tentang

kesehatan lingkungan, perilaku hidup sehat dengan status kesehatan (studi korelasi pada penduduk umur 10-24 tahun di Jakarta Pusat).” *Buletin penelitian sistem kesehatan*, 17,no 1.(2014): 89-95.

Prafitasari, A., & Wiludjeng, F. A. “Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi”. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, *4* no 2 . (2016): 31-48.

Retno Susanti, Djoko Suwandono, Mussadun. (2019). Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wisata Industri Batu Bata Di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. JURNAL PASOPATI - Vol. 1, No. 2 Tahun 2019.

Riyadi & Deddy Bratakusumah. (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Sartika, Ika, Pemerintah Daerah, and Perencanaan Pembangunan. “Collaborative Governance Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat” 14, no. 2 (2024): 209–233.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *PEMBANGUNAN EKONOMI, edisi 9, jilid 1*. Erlangga.